

**RESTRUKTURISASI PERAN LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL (LEMHANNAS) DALAM TATA PEMERINTAHAN
INDONESIA YANG BERKEMANFAATAN**

D I S E R T A S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :

Hasan Basri

NIM : 23730569

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2025**



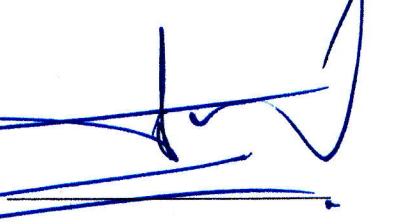
LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

JUDUL : RESTRUKTURISASI PERAN LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL (LEMHANNAS) DALAM TATA
PEMERINTAHAN INDONESIA YANG
BERKEMANFAATAN

Disusun Oleh Mahasiswa

Nama : Hasan Basri

NIM : 23730569

Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Promotor

30/25
/Q

Dr. Tina Amelia, S.H., M.H.

Ko. Promotor

30/25
/8



**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Hasan Basri

NIM : 23730569

No	Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, Ms		01/09/25
2.	Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M		30/8/25
3.	Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H		30/8/25
4.	Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H		20/8/25
5.	Dr. Sukmareni, S.H., M.H		30/8/25
6.	Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., M.M		30/8/25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasan Basri lahir di Gerung, Lombok Barat, pada tanggal 10 Juni 1980. Ia mempunyai karir sebagai anggota POLRI. Hasan Putra dari Almarhum Bapak H. Redowan, S.H dan Ibu HJ. Mahnep. Istri bernama Yupiana, S.H dan dikaruniai 4 anak yang bernama Kheiza Yuha Pratama Basri, Kenzo Yasa Prasatya Basri, Queena Mecca Princess Basri dan Kazuo Yupha Prawira Basri. Pendidikan dasarnya dimulai di SDN 1 Gerung, Lombok Barat, yang diselesaikan pada tahun 1991, kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Lombok Barat dan lulus pada tahun 1995. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK/STM Citra Pusaka, Jakarta Selatan, dan diselesaikan pada tahun 1999. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Tama Bhayangkara

Jakarta Raya dan meraih gelar sarjana (S1) pada tahun 2006. Gelar magister (S2) ia peroleh dari Universitas Tama Jagakarsa pada tahun 2017.

Dalam perjalanan kariernya, Hasan Basri terlibat dalam berbagai penugasan penting, di antaranya pengamanan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2004, mengikuti pendidikan pengembangan Pama VIP pada tahun 2021, serta menjadi staf pengamanan Menteri BUMN RI dari tahun 2006 sampai 2009 dan staf pengamanan Menteri/Kepala Bappenas RI pada tahun 2012. Ia juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi oleh Kepala sekretaris Presiden, sampai saat ini jabatan sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Koorsppipim) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Hasan Basri juga pernah menjalani penugasan luar negeri di beberapa negara, seperti Belanda, Rusia (termasuk Moscow dan Amsterdam), Singapura, dan Thailand, dalam rangka pendampingan serta penugasan resmi.

Hasan Basri juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan akademik, yang ditunjukkan melalui partisipasinya dalam forum-forum konferensi internasional. Ia pernah menyusun dan mempresentasikan artikel ilmiah berjudul "*Effectiveness of the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers under Ministerial Regulation No. 4 of 2023 on Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector*" dalam *The 4th Multidisciplinary International Conference (MIC) 2024*. Selain itu, ia juga menjadi penulis artikel ilmiah berjudul "*Moral Responsibility of Curators in the Liquidation of State-Owned Legal Entity Companies*" yang dipresentasikan dalam *The 4th International Conference on Law, Social Science, Economics and Education (ICLSSEE 2024)*.

ABSTRAK

Hasan Basri, **Restrukturisasi Peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Dalam Tata Pemerintahan Indonesia yang Berkemanfaatan**, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M. sebagai Promotor dan Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., CLA. sebagai Ko.Promotor.

Ketahanan nasional merupakan elemen kunci dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara, terutama di tengah dinamika ancaman global dan domestik yang semakin kompleks. Konsep ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan militer, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Dinamika ketahanan nasional saat ini, peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) kerap mengalami kendala akibat ketidakjelasan kedudukannya dalam tata pemerintahan. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sering kali hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan kader bangsa, tanpa dimaksimalkan sebagai institusi strategis yang memiliki otoritas dalam merumuskan kebijakan terkait ketahanan nasional.

Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana kedudukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang telah berdiri sejak tahun 1965, dalam tata pemerintahan Indonesia di tengah dinamika hukum dan kebutuhan pembaharuan yang holistik dan terintegrasi? Bagaimana kelemahan dalam struktur dan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akibat ketidakjelasan regulasi, terutama dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ketahanan nasional? Bagaimana cara memaksimalkan peran dan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) agar lebih efektif dalam menghadapi ketidakpastian serta dinamika geopolitik dan ancaman global yang kompleks? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual untuk mengevaluasi peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam tata pemerintahan Indonesia.

Hasil penelitian yang didapat adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti Lembaga Ketahanan Nasional, berada di bawah presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Secara tata pemerintahan, kedudukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian setara dengan menteri. Lembaga Ketahanan Nasional, menghadapi masalah terkait kewenangan dan efektivitas peraturan yang dikeluarkan. Banyak peraturan yang hanya mengikat internal lembaga dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat masyarakat luas, kecuali jika melalui proses formal menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Restrukturisasi peran dan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional melalui transformasi Peraturan Presiden (Perpres) menjadi Undang-Undang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika geopolitik serta ancaman global yang semakin kompleks. Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, memungkinkan Lembaga Ketahanan Nasional untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan strategis dan mengimplementasikannya.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Lembaga Ketahanan Nasional, Tata pemerintahan.